

---

---

**DINAMIKA PRAKTIK COLLABORATIVE GOVERNANCE DI BIDANG  
KEBENCANAAN DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN  
PONOROGO, JAWA TIMUR**

**Khoirurrosyidin<sup>1)</sup>\*, Robby Darwis Nasution<sup>2)</sup>, Bambang Triono<sup>3)</sup>, Yusuf Adam Hilman<sup>4)</sup>,**  
<sup>1234</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jalan Budi Utomo  
No 10 Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 40132, Indonesia.

\* Korespondensi Penulis. E-mail: adam\_hilman@umpo.ac.id Telp: +6281296125801

**Abstrak**

Konsep *Collaborative Governance* mulai banyak dilakukan oleh lembaga pemerintah, hal ini tidak terlepas dari kebutuhan lembaga yang ingin menjalankan programnya secara maksimal, melalui pelibatan aktor di luar sistem, pemerintah menyadari bahwa mereka tidak akan bisa mencapai keberhasilan dalam menjalankan program jika dilakukan sendiri tanpa bantuan pihak lain, sehingga keterlibatan pihak lain menjadi penting, seperti: akademisi, media, dan juga komunitas masyarakat. Kajian ini memperlihatkan adanya permasalahan terkait dengan kapasitas pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen kebencanaan, yang mana konsep *Collaborative Governance* dapat menjadi salah satu solusi, apakah sudah dilakukan di Desa Ngabar, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, dengan jenis data berupa wawancara dan dokumentasi, informannya adalah perangkat desa yang dianggap memahami proses manajemen kebencanaan yang ada di desa. Pelaksanaan Penanggulangan bencana masih sangat umum, dikarenakan hanya melibatkan lembaga pemerintah saja, sehingga belum sesuai dengan konsep *Collaborative Governance*, hal tersebut disadari oleh aparatur desa, sehingga merasa perlu melakukan pengembangan lebih lanjut, dengan melibatkan pihak di luar pemerintah untuk membantu tugas mereka, akan tetapi ada kendala terkait bagaimana langkah yang harus dilakukan, serta bagaimana memanfaatkan anggaran yang dimiliki desa, sehingga diperlukan inisiasi serta pendampingan bagi desa.

**Kata Kunci:** *Collaborative Government; Kebencanaan; Pemerintahan Desa;*

**Abstract**

*The concept of collaborative governance began many, carried out by government agencies it is not in spite of the needs of institutions that want to run programs maximally, by involving actors, outside the system, the government realized that they do not be able to achieve success in running the program if you do alone without assistance, the other hand so that the involvement of other parties to be critical, like academics the media, and also the community. This study shows that their problems are associated with the capacity of the government in providing disaster management, the concept of collaborative governance which can be a solution, is conducted in Ngabar Village, Siman Distrik, Ponorogo Regency. This research out qualitative descriptive, in an interview with the kind of data and documentation, informants are village officials considered understand the process disaster management at village level. The disaster is still very general because only involve the government, so it is not in accordance with the concept of collaborative governance, village officials appreciate it, that they need to do further development, By involving the outside the government to help their task, but obstacles regarding how steps to be carried out, and how to benefit from village budget availability, leading to the need and assist initiation village.*

**Keyword:** *Collaborative Government; Disaster; Village Administratitons;*



### PENDAHULUAN

Konsep *Collaborative Governance* merupakan pengembangan model tata kelola pemerintahan, yang menekankan pada keterlibatan pihak – pihak yang ada di luar pemerintah dalam upaya mencapai tujuan negara. Pihak-pihak yang terlibat beragam, mulai dari akademisi, komunitas masyarakat hingga media. Secara sederhana konsep *Collaborative Governance* merupakan kombinasi antara lembaga pemerintah dengan lembaga non pemerintah, yang meliputi pihak swasta ataupun dengan komunitas sosial yang ada di masyarakat (Nugroho & Hilman, 2020).

Praktik *Collaborative Governance* sendiri muncul atas dasar kesadaran pemerintah terkait terbatasnya kapasitas serta kemampuannya yang dimiliki dalam rangka menyelesaikan urusan publik sendirian, sehingga keterlibatan pihak swasta menjadi sebuah keniscayaan bahkan akhir-akhir ini menjadi salah satu solusi yang dapat dilaksanakan, agar peran pemerintah menjadi lebih optimal.

Secara aplikatif konsep itu telah banyak mewarnai praktik tata kelola pemerintahan di Indonesia, yang mana keterlibatan sektor publik memiliki porsi yang cukup besar hingga dalam penentuan keputusan, selama ini beberapa praktik *Collaborative Governance* terlihat di berbagai bidang kehidupan, misalnya: bidang pariwisata, pengembangan kawasan dan potensi lokal, bidang pengelolaan dana desa.

Pengelolaan pariwisata bencana lava telah memperlihatkan upaya kolaborasi untuk pengembangan sektor tersebut supaya lebih berkembang, dengan melibatkan pihak swasta dalam proses urun rembug dengan tujuan bersama melalui persamaan persepsi (Diani & Simbolon, 2017).

Pengembangan kawasan minopolitan di Kabupaten Sidoarjo menerapkan konsep kolaborasi dengan melibatkan aktor dari pemerintah dan swasta, untuk meningkatkan mobilitas dan juga sinergitas antar bidang, agar pengembangan wilayah bisa berjalan denganmaksimal (Arrozaaq, 2018).

Pemerintah desa melakukan praktik kolaborasi dalam upaya pengelolaan dana desa, dengan melibatkan pemerintah, kepolisian, komunitas masyarakat, hal ini terjadi karena pemerintah desa memiliki keterbatasan sumberdaya manusia, sehingga perlu melibatkan pihak luar pemerintah supaya pengelolaan desa bisa transparan dan akuntabel (Islamy, Andriani, & Hanafi, 2020).

Praktik kolaborasi yang dilaksanakan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan wilayah yang diutarakan di atas, merupakan bukti nyata keberhasilan kolaborasi, sehingga perlu adanya perubahan pola lama terkait penyelenggaraan pemerintahan, yang tadinya didominasi pemerintah harus dikurangi, ruang-ruang kolaborasi harus dibuka serta diimbangi dengan pihak swasta, supaya dapat tercipta sinergitas yang seimbang, dan berkelanjutan, guna mencapai tujuan negara kesejahteraan *Welfare State*.

Model kolaborasi yang cukup efektif, apakah juga dapat dilakukan atau diterapkan dalam bidang penanggulangan bencana, hal ini tentunya masih perlu dikaji secara mendalam, sebagai sebuah contoh bagaimana pemerintah desa merumuskan konsep kolaborasi dalam upaya membangun model yang efektif dalam penanggulangan bencana, selama ini praktik penanggulangan bencana masih bersifat pasif, yakni dengan memasukan anggaran penanggulangan bencana dalam dokumen APBDes, ketika terjadi bencana baru anggaran dicairkan untuk kegiatan santunan, mengganti kerugian, dan juga revitalisasi korban terdampak.

Realitas tersebut memperlihatkan jika pemerintah desa terlalu mendominasi dan pasif dalam rangka penanggulangan bencana, padahal ketika kondisi bencana dibutuhkan upaya yang cepat, agar dapat segera pulih seperti sedia kala. Merumuskan model kolaborasi bisa digagas dalam praktik pemerintahan di desa, melalui proses pembuatan peraturan desa, yang melibatkan berbagai pihak supaya penanggulangan bencana bisa dikelola dan direncanakan.

Persoalan yang terjadi selama ini peranan pemerintah desa terlalu dominan, dan terlihat hanya melakukan Langkah-langkah pasif serta normatif dalam perencanaan kebencanaan, sehingga menarik jika pemerintah desa mulai membuka ruang-ruang kolaborasi, sehingga terjadi sinergitas antara pihak swasta dengan pemerintah, yang dapat memunculkan terobosan baru.

Persoalan tersebut merupakan dinamika yang akan dikaji dalam penelitian ini, sehingga menjadi hal yang menarik apakah konsep tersebut bisa dipraktikkan, atau hanya menjadi rangkaian normatif yang dijalankan secara pasif.

*Implementing agency* adalah konsep yang menjadi ruh lahirnya konsep *Collaborative Governance*, konsep ini muncul pada tahun 1980 di negara-negara barat, yang ditujukan untuk membatasi dan/atau meminimalkan peran negara dalam praktik pembangunan dan didelegasikan kepada aktor lain, hal tersebut muncul dari kesadaran negara akan keterbatasannya, terkait: sumber daya alam, teknologi, dan juga kemampuan dalam bidang teknologi, yang kemudian memberikan ruang terhadap *civil society* atau masyarakat sipil dan pihak swasta untuk turut serta dalam penentuan kebijakan (Arrozaaq, 2018). Emerson dan Nabatchi menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* adalah sebuah program dalam sistem pengambilan keputusan yang memungkinkan orang atau pribadi terlibat dan melintas batas (Ramadhan, 2020).

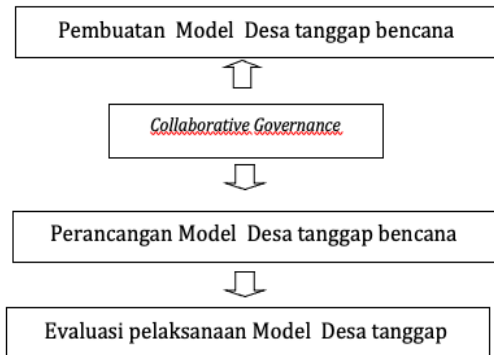
*Collaborative Governance* yang mana merupakan sebuah konsep yang melibatkan berbagai peran atau pihak tidak hanya dari pemerintah dan non pemerintah saja melainkan pula dari *stakeholder* lain, sektor privat, masyarakat ataupun komunitas sipil yang berbagai pihak tersebut memiliki kepentingan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama (Parameshwari, Fajrina, & Amsyah, 2019).

*Collaborative Governance* terkait dengan sebuah proses yang memperhatikan struktur organisasi yang telah melewati batas-batas organisasi itu sendiri, namun tetap memiliki nilai dasar, yakni: 1). Berorientasi terhadap konsensus dalam mencapai tujuan, 2). Memiliki kepemimpinan kolektif dalam sebuah organisasi, 3). Adanya komunikasi secara dua arah dalam proses pencapaian tujuan, yang nantinya kesemua nilai ini akan menghasilkan sebuah kebijakan publik (Dewi, 2019).

*Collaborative Governance Governance* memiliki prasyarat, di antaranya: 1). Terdapat berbagai standar yang dipercayai oleh *stakeholders*, 2). Harus lebih dari *stakeholders* yang terlibat dan keterlibatannya tidak ada unsur paksaan, 3). Di dalam praktik tersebut terdapat bagian-bagian yang tidak bisa dipisahkan, seperti: desain; aturan, dan implementasi) (Diani & Simbolon, 2017).

Kajian terdahulu mengenai konsep *Collaborative Governance* telah jelas di gambarkan, sebagai sebuah kerangka permodelan yang harus dilakukan, agar terwujud konsep yang ideal dan efektif.

Pembahasan di atas telah memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep *Collaborative Governance* yang menjadi kerangka untuk dibumikan serta dikembangkan dalam rangka uji coba konsep tersebut, termasuk dalam upaya penanggulangan bencana. Konsep tersebut secara sederhana bisa dilihat dari gambar 1.



Gambar 1. Konsep *Collaborative Governance* permodelan desa tanggap bencana

**METODE**

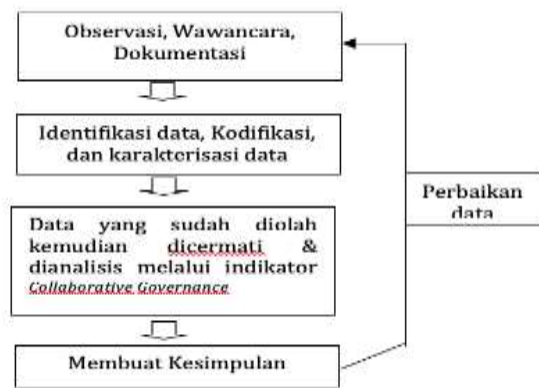
Penelitian ini berjudul: “Dinamika Praktik *Collaborative Governance* Bidang Kebencanaan di Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo “ yang secara khusus membahas mengenai konsep *Collaborative Governance*.

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis untuk melihat dinamika yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan konsep tersebut. Penelitian ini dikategorikan dengan jenis kualitatif deskriptif.

Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, data primernya melalui observasi atau pengamatan langsung serta wawancara di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, dukumentasi, serta berbagai literatur yang berasal dari jurnal dan juga buku.

Data penelitian berupa hasil wawancara diperoleh dari Informan tersebut perangkat desa dengan model *purposive Sampling*, yang dipilih dengan pertimbangan paham dengan praktik penanggulangan bencana di desa yang diteliti. Selain itu peneliti juga menampilkan data dokumen berupa foto dan juga dokumen terkait.

Data yang sudah berhasil dihimpun kemudian dilakukan identifikasi dan juga kodifikasi, yang selanjutnya akan di analisis secara deskriptif kualitatif, melalui proses penelitian, hal tersebut dapat di lihat dari gambar 2 tentang alur analisis data.



Gambar 2 Alur Analisis Data

Proses uji keabsahan data dilakukan seiring dengan proses pengumpulan data, menggunakan model triangulasi triangulasi sumber agar data yang dikumpulkan, benar-benar sah dan dapat di pertanggungjawabkan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pemahaman Desa Tanggap Bencana**

Pemahaman perangkat desa terkait desa tanggap dan tangguh bencana, sangat beragam, hal ini bisa dilihat dari beberapa pendapat mereka, antara lain:

**Agus Supriyadi** berpendapat bahwa tanggap bencana merupakan upaya yang sudah semestinya dilakukan dalam aktifitas penanggulangan bencana, selain itu tangguh bencana di Desa Ngabar dirasakan cukup siap (Supriyadi, 2021). **Subagiyo** mengutarakan bahwa penanggulangan bencana merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki desa untuk

mengetahui dan menyelesaikan bencana melalui SOP dan mekanisme yang jelas (Subagiyo, 2021). **Marikun** menyatakan bahwa desa tanggap dan Tangguh bencana merupakan sebuah kemampuan untuk mempersiapkan kebutuhan dan kepentingan warganya ketika terjadi bencana (Marikun, 2021). **Tarmuji** mengutarakan jika desa tanggap dan tangguh bencana yaitu kemampuan mandiri desa untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, dan mampu menghadapinya (Tarmuji, 2021). **Maryono** menyatakan bahwa desa tangguh dan tanggap bencana merupakan kondisi sebuah desa yang mampu atau bisa melakukan manajemen bencana, bagaimana bencana bisa terjadi, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana proses penyelesaiannya (Maryono, 2021). **Devi Handayani** berpendapat bahwa desa tanggap dan tangguh bencana yaitu desa yang memiliki kemampuan untuk menanggulangi dan memberikan solusi terkait adanya bencana yang akan terjadi atau bencana yang sudah terjadi (Handayani, 2021).

Hasil wawancara memperlihatkan pemahaman yang sama dari perangkat Desa Ngabar tentang konsep desa tangguh bencana dengan pemahaman yang cukup baik, pemahaman yang sama tentang penanggulangan bencana merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga pemahaman tersebut menjadi dasar pelaksanaan strategi dan juga langkah teknis penanggulangan bencana di desa Ngabar.

### Proses penanggulangan bencana di Desa Ngabar

Upaya untuk melakukan pelaksanaan penanggulangan bencana yang ada di Desa Ngabar, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan mengandeng mitra melalui bentuk Kerjasama, serta tolong menolong antar sesama warga desa, hal tersebut seperti penuturan para informan dalam penelitian ini.

**Devi Handayani** mengutarakan jika penanggulangan bencana di desa Ngabar sudah

cukup baik karena sudah bekerjasama dengan lintas sektor seperti: Kecamatan, Babinsa, Babinkamtibmas dan juga puskesmas (Handayani, 2021). **Agus Romdhoni** menjelaskan kondisi desa tanggap di Desa Ngabar selalu siap sedia baik warganya maupun aparat desa saling tolong – menolong baik secara materi maupun non materi (Romdhoni, 2021). **Subagiyo** menuturkan jika dalam penanganan di Desa Ngabar selalu mengedepankan musyawarah dan koordinasi dengan semua pihak terkait supaya tidak bersebrangan dengan aturan yang berlaku (Subagiyo, 2021).

Bentuk Kerjasama dilakukan pihak desa dengan kecamatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta puskesmas, namun sebelum dilaksanakan penanggulangan bencana Pemerintah desa Ngabar meakukan musyawarah desa, namun pelibatan aktor lain seperti media masa, komunitas masyarakat seperti LSM dan NGO masih belum ada sebagai indikator pelaksanaan *Collaborative Governance*, akan tetapi mekanisme musyawarah mufakat ini menjadi modal sosial yang penting dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.



Gambar 3 a Partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan bencana



Gambar 3b Partisipasi Masyarakat dan Lembaga pemerintah dalam penanggulangan bencana



Gambar 3c Pelaksanaan Penanggulangan Bencana oleh Pemerintahan Desa Ngabar dengan TNI-Polri

Gambar 3a,b,c Memperlihatkan proses partisipasi masyarakat dan juga Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah desa Ngabar dengan Babinkamtibmas, serta babinsa, dalam rangka penanggulangan bencana, untuk meminimalisir resiko bencana ataupun melakukan pencegahan.

### Partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan bencana

Partisipasi masyarakat juga sangat penting, hal ini akan sangat membantu serta

mendukung tugas serta kinerja pemerintah desa dalam upaya penanggulangan bencana, supaya lebih efektif dan optimal, bisa dilihat dari data hasil penelitian masyarakat sangat antusias dalam penanggulangan bencana.

**Devi Handayani** peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana terlihat dari bantuan masyarakat yang di berikan kepada korban terdampak, selain itu masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam membantu program dari pemerintah (Handayani, 2021). **Maryono** mengungkapkan bahwa masyarakat sangat antusias dalam membantu pemerintah desa, hal tersebut dapat dilihat dari dukungan masyarakat terhadap posko – posko bencana di tiap rt sehingga terlihat sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah desa (Maryono, 2021). Subagiyo mengungkapkan bahwa masyarakat selain berpartisipasi aktif juga mulai memiliki kesadaran bahwa pemerintah memiliki keterbatasan sehingga jika dilakukan oleh pemerintah saja maka akan kurang optimal, sehingga masyarakat turut andil dalam kegiatan bermasyarakat (Subagiyo, 2021).

Partisipasi aktif dan juga peran serta masyarakat merupakan modal sosial yang dimiliki pemerintah desa, dalam upaya pengembangan konsep *Collaborative Governance* nantinya, karena masyarakat merupakan bagian penting dalam proses penanggulangan bencana.

### Rekomendasi lanjutan terhadap upaya penanggulangan bencana yang sudah ada

Upaya Penanggulangan bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Ngabar, memang masih jauh dari kata ideal sesuai dengan konde *Collaborative Governance*, sehingga dari hasil penghimpunan data dengan teknik wawancara, menghasilkan sebuah rekomendasi terkait, beberapa hal,

diantaranya: a). Penguatan SDM, b). Sarana pendukung yang memadai, c). kebutuhan pendanaan atau *finansial* memberikan gambaran, jika ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam upaya penanggulangan bencana, antara lain.

Agus Romdhoni menjelaskan bahwa dalam upaya memperkuat kapasitas penanggulangan bencana, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi, yaitu: 1). Penguatan SDM bagi satgas diantaranya dengan mengadakan pelatihan – pelatihan. 2). Sarana dan prasarana penunjang yang memadai, 3).Pendanaan (Romdhoni, 2021). Turmuji menjelaskan dalam kaitannya dalam peningkatan kapasitas desa tanggap bencana di perlukan pembentukan satgas bencana (Turmuji, 2021).

**Mokamat Samsuri** menjelaskan bahwa dalam rangka memperkuat kapasitas desa bencana, diperlukan pembentukan satuan tugas atau tim penanggulangan bencana, perlu adanya penyusunan rencana sarana dan akomodasi penanggulangan bencana, serta penyediaan anggaran penanggulangan bencana (Samsuri, 2021). **Agus Supriyadi** mengungkapkan terkait dengan peningkatan kapasitas desa dalam penanggulangan bencana perlu diadakan pelatihan – pelatihan terkait kebencanaan (Supriyadi, 2021). **Subagiyo** menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kapasitas desa alangkah baiknya perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang menggandeng dinas terkait supaya dapat menyerap anggaran dan perlu dipikirkan darimana dan itu di peroleh, selain itu perlu juga peningkatan kapasitas SDM satgas dan juga masyarakat terkait kebencanaan (Subagiyo, Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Desa tangguh Bencana, 2021). **Marikun** mengungkapkan dalam upaya peningkatan kapasitas tersebut diperlukan upaya secara kelembagaan satuan tugas bencana yang baik, selain itu perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat supaya desa siap menghadapi bencana (Marikun, 2021). **Harnoto** mengungkapkan berkaitan dengan peningkatan kapasitas desa, diperlukan upaya yang lebih agar partisipasi masyarakat lebih baik, dan juga diperlukan bantuan yang di perlukan untuk satuan tugas supaya kinerjanya lebih baik (Harnoto, 2021). **Soeran** mengungkapkan perlu adanya sebuah lembaga yang berkaitan erat

dengan upaya tanggap bencana di desa ngabar (Soeran, 2021).

Rekomendasi penanggulangan di Desa Ngabar merupakan poin penting yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam upaya penanggulangan bencana (PB) sesuai dengan konsep *Collaborative Governance*, melalui pelibatan aktor-aktor yang ada di luar pemerintahan, seperti: komunitas masyarakat, akademisi, media dan pihak – yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

## SIMPULAN DAN SARAN

Praktik *Collaborative Governance* yang dilaksanakan di Desa Ngabar, masih jauh dari pelaksanaan dari konsep *Collaborative Governance*, karena melibatkan aktor pemerintahan saja, ditambah dari kepolisian dan tantara (babinsa / babinkamtibmas) belum melibatkan NGO atau LSM serta media yang memang berada di luar pemerintahan, akan tetapi proses penanggulangan bencana di Desa Ngabar, terdapat potensi pengembangan konsep *Collaborative Governance*, dengan kekuatan kelembagaan serta modal sosial yang ada di desa, bisa mempermudah pelaksanaan konsep tersebut nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arrozaaq, D. L. (2018). *Colaboration Government (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Dewi, N. L. (2019). *Dinamika Colaborative Government dalam studi kebijakan*

Publik. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosia,  
200 - 210.

Diani, R. M., & Simbolon, Y. K. (2017). Analisis Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour. *Forum Ilmu Sosial*, 43-54.

Islamy, L. O., Andriani, R., & Hanafi, E. P. (2020). Model Colaborative Governance dalam pengelolaan dana desa. *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, 81 - 94.

Nugroho, I., & Hilman, Y. A. (2020). Sinergitas Program “Fantastic! Ponorogo” Dalam Rangka Pembangunan Pariwisata Berbasis Collaborative Governance Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 220 - 229.

Parameshwari, A., Fajrina, D. O., & Amsyah, E. (2019). Collaborative Governance dalam menejemen tata ruang di Cafe Sawah Pujon Kidul Kabupaten Malang. *PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0”*. (pp. 1046 - 1070). Malang: Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) dan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.

Ramadhan, G. (2020). Fintech dan Colaborative Government dalam Pertanian di Banten. *Jurnal Ilmu Administrasi (Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi)*, 145 - 160.

## PROFIL PENULIS

**Khoirurrosyidin** Penulis merupakan dosen di program studi ilmu pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dengan konsentrasi Birokrasi.

**Robby Darwis Nasution** Penulis merupakan dosen di program studi ilmu pemerintahan, FISIP, Universitas muhammadiyah Ponorogo, dengan konsentrasi kajian politik lokal.

**Bambang Triono** Penulis merupakan dosen di program studi ilmu pemerintahan, FISIP, Universitas muhammadiyah Ponorogo, dengan konsentrasi kajian Kebijakan Publik.

**Yusuf Adam Hilman** Penulis merupakan dosen di program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas muhammadiyah Ponorogo, dengan konsentrasi kajian sosiologi pemerintahan dan pembangunan.